

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi dan Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2000). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkonsep kemiskinan berkaitan erat dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi, dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk.

Arsyad (1999) menjelaskan bahwa kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, kebutuhan manusia itu bermacam-macam, sehingga kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Aspek primer berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta miskin keterampilan. Aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi dan air, perumahan yang

tidak sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa adanya kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya, dan aspek lainnya ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individu maupun kelompok. Arsyad (1999) juga menambahkan bahwa, kita sering mendengar istilah kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun demikian, yang miskin itu bukanlah (daerah) desa atau kotanya, melainkan manusianya atau penduduk di daerah tersebut.

Wigjosoebroto (2005) dalam Neni (2013) menyatakan kemiskinan juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan sumber-sumber daya yang langka dan perkembangan teknologi yang rendah. Artinya, faktor seseorang menjadi miskin secara alami memang ada, dan tidak berarti bahwa akan ada individu atau sekelompok orang yang lebih miskin dari orang lain. Dalam konsep kemiskinan alamiah ini terdapat perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan di eliminasi dengan pranata-pranata tradisional, seperti jiwa gotong royong dan sejenis lainnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial.

- b. Kemiskinan buatan, kemiskinan yang terjadi akibat struktur sosial yang ada membuat individu atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas dengan baik. Konsep kemiskinan buatan ini terjadi bukan karena individu atau sekelompok orang yang malas bekerja atau karena terus menerus sakit, melainkan beberapa pakar mengidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan karena struktur masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Bappenas (2011) membagi kemiskinan menurut penyebabnya menjadi 2 macam:

1. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.
2. Kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, oleh karena itu mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan

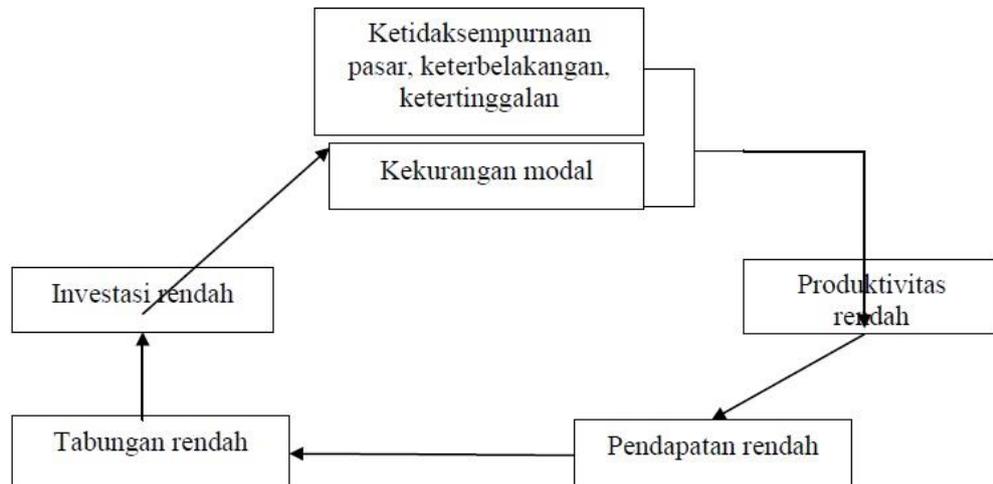
dan membesakan diri dari perangkap kemiskinan atau dengan kata lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Sharp, et.al (1996) dalam Kuncoro (2000) menjelaskan penyebab kemiskinan dipandang dari sudut ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada akhirnya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau adanya keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan juga akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Kemudian rendahnya investasi

akan menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya. Berikut merupakan gambar lingkaran setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*).



Sumber : Nurkse dalam Kuncoro (2000)

Gambar 2. 1

Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Menurut Nurkse (Kuncoro, 2000) lingkaran setan kemiskinan terjadi akibat dari keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal yang menjadi penyebab produktivitas rendah, sehingga pendapatan rendah dan akibatnya berdampak pada berkurangnya tabungan investasi yang menyebabkan keterbelakangan, hal tersebut terjadi seterusnya. Kemudian Nurkse dalam Hudyanto (2015) mengatakan lingkaran setan kemiskinan adalah deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan negara miskin atau orang miskin tetap berada dalam keadaan sengsara. Karena miskin, maka produksi mereka rendah, produksi yang rendah mengakibatkan pendapatan

rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan daya beli rendah, daya beli yang rendah mengakibatkan kekurangan modal, kekurangan modal mengakibatkan investasi rendah, investasi rendah berarti produksi rendah, produksi rendah menyebabkan adanya kemiskinan. Dengan kata lain miskin menyebabkan miskin.

2. Ukuran Kemiskinan

Arsyad (1999) menjelaskan 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

(1) Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang lain dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ditemukan tingkat pendapatan minimum yang digunakan sebagai pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau biasa disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, namun juga dipengaruhi oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak seseorang

membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

(2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif ini merupakan konsep perbaikan dari kemiskinan absolut, dimana kemiskinan itu akan selalu ada. Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tidak selalu berarti tidak miskin. Beberapa ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dari keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih termasuk golongan miskin. Hal itu terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari lingkungan orang yang bersangkutan.

3. Garis kemiskinan

Garis kemiskinan menurut Hudiyanto (2015) bisa didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan pendapatan yang sekedar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari (pas-pasan) secara layak. Garis kemiskinan sendiri berbeda antar negara dan antar lembaga, tergantung dari pertimbangan masing-masing negara atau lembaga tersebut. Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu, pertama pengeluaran yang

dilakukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan elemen ini bersifat subyektif.

Hudiyanto (2015) menyebutkan ukuran garis kemiskinan menurut Bank Dunia pada awalnya (tahun 1970-an) menggunakan nilai pendapatan yang disertakan dengan dollar sebagai ukurannya. Garis kemiskinan untuk perkotaan di tetapkan sebesar 75 dollar Amerika, dan 50 dollar Amerika untuk daerah perkapita pertahun. Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi, karena pendapatan nominal orang yang hidup di perkotaan mempunyai nilai riil yang lebih rendah daripada nilai riil pendapatan masyarakat pedesaan. Namun belakangan ini Bank Dunia menggunakan ukuran lain dalam mengukur garis kemiskinan, yaitu senilai 1 dollar Amerika per hari, atau kadangkala menggunakan 2 dollar Amerika per hari sebagai garis kemiskinan. Orang yang berpendapatan diatas 2 dollar Amerika per hari dikatakan bukan orang miskin, dan sebaliknya (Hudiyanto, 2015).

Di Indonesia ukuran garis kemiskinan yang digunakan di tentukan oleh beberapa lembaga dengan cara pengukuran yang berbeda-beda, seperti Badan Pusat Statistik, BKKBN, dan Bappenas. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS membagi kriteria dalam pengukuran kemiskinan untuk tahun 2012 yaitu :

1. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran orang per kapita per bulan lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 sampai dengan Rp 350.610.
3. Hampir miskin, yaitu mereka yang pengeluaran per bulannya per kepala antara Rp 233.740 sampai dengan Rp 280.488.
4. Miskin, yaitu pengeluaran per bulan per orangnya adalah sebesar Rp 233.740 ke bawah.
5. Sangat miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.

4. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai terjadinya peningkatan output karena ada peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut (Hudiyanto, 2015).

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang diantaranya (Hudiyanto, 2015):

1) Teori pertumbuhan Adam Smith

Teori pertumbuhan Adam Smith terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu mulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocoktanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Dalam teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Titik sentral dalam pembahasan teori Adam Smith yakni pembagian kerja dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menurutnya, spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong, yaitu: (1) peningkatan keterampilan pekerja, (2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Menurut teori ini akumulasi modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi investor, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Hal tersebut akan mendorong perekonomian semakin pesat (Kuncoro, 2000).

2) Teori David Ricardo

Teori ini merupakan pengembangan dari teori Adam Smith, sehingga secara garis besar kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam teori David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith, antara lain yaitu kesimpulan bahwa perpacuan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk, dan dalam jangka panjang perekonomian akan berada dalam keadaan stasioner (Hudiyanto, 2015). David Ricardo memusatkan perhatian pada peranan manusia dalam pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain yaitu output nasional ditentukan oleh jumlah penduduk (sebagai tenaga kerja). Jika jumlah penduduk meningkat pesat maka output juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini David Ricardo menyatakan bahwa jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku. Bila tingkat upah berada di atas tingkat upah minimum (yang ditentukan oleh pemerintah) akan ada kecenderungan jumlah penduduk meningkat karena setiap orang merasa mampu hidup sejahtera, dan akan meningkatkan jumlah anak atau jumlah anggota keluarga. Namun, justru kecenderungan ini akan menurunkan tingkat upah karena akan semakin banyak penawaran tenaga kerja. Jika tingkat upah berada dibawah upah minimum, jumlah penduduk akan cenderung menurun karena mengingat ketidakmampuan orang dalam menanggung beban

hidupnya, apalagi dengan keluarga yang banyak. Penurunan penduduk tersebut selanjutnya akan meningkatkan tingkat upah. Demikianlah tingkat upah akan naik turun, begitu pula dengan jumlah penduduk. Namun, dalam jangka panjang tingkat upah akan cenderung sama dengan tingkat upah minimumnya sehingga tidak ada dorongan bagi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk.

Oleh karena itu David Ricardo mengasumsikan dalam jangka panjang jumlah penduduk akan konstan, karena output tergantung dari jumlah penduduk. Maka diperkirakan dalam jangka panjang output nasional akan cenderung konstan, sehingga pendapatan perkapita akan konstan. Pada kondisi inilah kemudian disebut kondisi yang stasioner (*semua tumbuh pada laju yang sama, sehingga kondisi perekonomian akan konstan*) (Hudiyanto, 2015).

3) Teori Harrod Domar

Menurut Harrod Domar pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh tingkat tabungan yang tinggi. Jika tabungan rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah pula. Harrod Domar pada dasarnya menekankan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin apabila adanya keseimbangan antara sisi produksi dengan sisi pengeluaran. Hal ini merupakan pengembangan dari teori ekonomi klasik, yakni ungkapan yang dikemukakan oleh JB Say bahwa *supply creates its own demand* (supply menciptakan sendiri permintaannya). Sedangkan menurut Keynes yaitu bahwa

sumber pertumbuhan ekonomi terletak pada sisi pengeluaran. Menurutnya pendapatan nasional akan mengalami kenaikan jika ada perubahan dalam pengeluaran oleh rumah tangga (konsumsi), perusahaan (investasi), maupun pemerintah (*government expenditure*). Menurut Harrod Domar harus terjadi keseimbangan antara keduanya, dengan kata lain sumber dari pertumbuhan ekonomi adalah saving (Hudiyanto, 2015).

4) Teori Rostow

Teori ini lebih banyak diambil oleh negara berkembang sebagai model pembangunannya. Teori Rostow ini mempertimbangkan aspek non ekonomi dalam pembangunan. Menurutnya pembangunan ekonomi bukan hanya mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertanian kearah sektor industri, melainkan juga mensyaratkan terjadinya aspek sosial politik dan budaya (Hudiyanto, 2015).

Rostow membagi pertumbuhan ekonomi itu kedalam 5 tahap:

1. Tahap masyarakat tradisional. Dalam tahap ini ciri dari masyarakatnya yaitu produksi perkapita dan produktifitas penduduk masih rendah, struktur sosial masih bersifat hierarki, dan dalam pemerintahan sering terjadi sentralisasi.

2. Tahap prasyarat untuk lepas landas. Tahap ini memasuki pertumbuhan yang mempunyai kekuatan terus menerus untuk tumbuh. Ciri-cirinya adalah terdapat peningkatan dalam tabungan masyarakat, investasi secara besar-besaran dilakukan terutama pada sektor prasarana, dan terdapat aktivitas yang inovatif.
 3. Tahap lepas landas. Tahap ini memiliki ciri-ciri; adanya peningkatan investasi dari 5 menjadi 10 persen dari produk nasional neto, adanya perkembangan dari beberapa sektor dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan terciptanya suatu kerangka dasar politik sosial dan kelembagaan yang mampu menciptakan perubahan-perubahan bagi peluasan sektor modern.
 4. Tahap dorongan ke arah kedewasaan. Pada masa ini industri pengolahan bergeser dari industri barang – barang modal menjadi industri barang konsumsi untuk konsumen domestik.
 5. Tahap konsumsi masal yang tinggi. Tahap ini industri besar mendominasi perekonomian, sementara sektor primer (pertanian dan pertambangan) mengalami penurunan.
- 5) Teori Joseph Schumpeter

Joseph Schumpeter dalam teorinya menekankan pada pentingnya inovasi sebagai sumber utama pembangunan. Jika pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output karena

peningkatan faktor produksi yang digunakan, sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output karena adanya aktifitas inovasi dalam proses produksi. Inovasi tersebut bisa berupa (1) penemuan produk baru, (2) penemuan sumber bahan baku baru, (3) penemuan teknik produksi baru, (4) penemuan pasar baru, maupun (5) penemuan manajemen baru yang lebih efisien. Kapan terjadinya inovasi menurut Schumpeter tidak bisa di prediksi karena merupakan hasil dari kreatifitas. Menurutnya pembangunan ekonomi tidak akan bersifat mulus melainkan akan berupa ‘ledakan’ yang tidak bisa diprediksi sesuai dengan sifat dan perkembangan kreatifitas manusia (Hudiyanto, 2015).

PDRB merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan di suatu daerah. Hudiyanto (2015) menjelaskan PDRB dibagi menjadi 3 pendekatan:

1. Pendekatan pendapatan (*Income approach*), yaitu berupa nilai pendapatan dari semua orang (gaji, bunga, sewa) dari penduduk.
2. Pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu berupa jumlah uang yang dikeluarkan oleh semua pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa.
3. Pendekatan produksi (*production approach*), yaitu berupa nilai produksi dari barang dan jasa.

PDRB dibagi menjadi PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. PDRB menurut harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan dan digunakan untuk melihat pergeseran atau struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB menurut harga konstan menunjukkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang ditentukan pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di suatu daerah. Pembangunan daerah harus diarahkan dengan baik sehingga setiap tahap atau proses pembangunan semakin mendekati tujuan. Menurut Simatupang dan Saktyanu dalam Ningrum (2015) menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ialah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Menurunkan jumlah penduduk miskin secara efektif merupakan salah satu pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Dengan kata lain, salah satu efektivitas dan kriteria utama dalam melakukan pembangunan yaitu dengan cara penurunan jumlah penduduk miskin.

Menurut Kuncoro (2000) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu daerah. Menurut Kuznets dalam Ningrum (2015), pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki korelasi yang erat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan ketika mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah dan merupakan syarat keharusan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Mills dan Pernia dalam Zami (2014) menggunakan analisis lintas negara menunjukkan bahwa suatu negara akan semakin rendah tingkat kemiskinannya jika laju pertumbuhan ekonominya dari tahun ke tahun meningkat, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB suatu daerah maka semakin cepat menurunkan tingkat kemiskinan.

b. Hubungan Upah Minimum dengan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dalam Sudirman dan Andriani (2017) upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap yakni suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi tertentu.

Menurut pasal 94 UU No.13 Tahun 2003 dalam Putri dan Yuliarmi (2013) kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah bertujuan agar pekerja tidak dieksploitasi serta mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Simanjuntak (1992) kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Penelitian Sulistiawati dalam Putri (2013) menemukan bahwa Kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam mengurangi kesenjangan upah yang terjadi di pasar tenaga kerja.

Menurut Kaufman dalam Alkautsar (2014) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum, seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum yang ditetapkan merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama untuk pekerja atau penduduk miskin. Semakin meningkatnya tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

c. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik yakni seluruh orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dengan kata lain penduduk merupakan masyarakat yang bertempat tinggal dengan tujuan menetap di suatu daerah di suatu negara dengan memiliki mata pencaharian yang tetap serta secara sah sudah tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut.

Menurut Dumairy (1996) penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi, karena jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

Teori Malthus dalam Mustika (2011) mengatakan bahwa “penduduk cenderung meningkat lebih cepat dari persediaan bahan makanan”. Kemudian para ekonom yang lain seperti Adam Smith dan Franklin juga mengatakan, yakni penduduk tumbuh bagaikan deret ukur dan deret hitung. Hal tersebut mengakibatkan sumberdaya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Sehingga hal itulah yang menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Subri dalam Sari dan Natha (2016) disebutkan bahwa jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (income per kapita)

negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai hambatan bagi upaya-upaya yang akan dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangatlah terbatas (Arsyad, 1999)

Kemudian Todaro dan Smith (2006) dalam bukunya dituliskan bahwa ada tujuh konsekuensi (dampak) negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat, yakni dampak–dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional.

- Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan jumlah penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita di sebagian besar negara-negara berkembang, terutama yang kondisi dasarnya masih miskin, tergantung pada sektor pertanian, serta diliputi keterbatasan lahan serta sumber daya alam.
- Dampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pertambahan penduduk yang cepat cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama mereka yang tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya menjadi korban pertama dari langkah-langkah penghematan pemerintah (misalnya ketika pemerintah terpaksa membatasi

dana untuk program-program kesehatan dan pendidikan). Jika terjadi bencana alam atau kerusakan lingkungan, dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami kemerosotan, mereka pula yang pertama merasakan akibatnya (Todaro & Smith, Pembangunan Ekonomi; Edisi Kesebelas. Jilid 2, 2006).

- Dampak terhadap pendidikan. Pada tingkat nasional, pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan distribusi anggaran pendidikan semakin kecil, dengan kata lain, mengorbankan kualitas demi kuantitas.
- Dampak terhadap kesehatan. Angka fertilitas yang tinggi cenderung merugikan kesehatan ibu dan anak anaknya. Hal tersebut juga memperbesar resiko kehamilan.
- Dampak terhadap ketersediaan bahan pangan. Jika penduduk terus bertambah, maka bertambah pula jumlah mulut yang harus disuapi. Jelas bahwa penyediaan bahan pangan secara memadai menjadi lebih sulit jika penduduk terus bertambah dengan pesatnya.
- Dampak terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang pesat ikut memacu proses kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup, baik berupa penggundulan hutan, erosi tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan pepadatan daerah hunian di perkotaan.

- Dampak terhadap migrasi internasional. Banyak pengamat menilai cepatnya peningkatan migrasi internasional, baik legal maupun ilegal, merupakan salah satu konsekuensi utama dari ledakan penduduk di negara-negara berkembang. Meskipun banyak faktor lain yang ikut memacu migrasi internasional, peran menonjol yang dimainkan oleh kelebihan tenaga kerja (akibat penduduk yang terus bertambah) terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia dalam perekonomian diberbagai negara berkembang tidak dapat dipungkiri.

Menurut Smith dalam Mustika (2011) menyebutkan, penduduk akan meningkat apabila tingkat upah yang diterima lebih tinggi dari tingkat upah minimum yang ditetapkan. Jika tingkat upah yang didapat lebih tinggi dari tingkat upah minimum, dengan arti bahwa hidupnya sudah layak, maka orang akan melaksanakan perkawinan relatif muda sehingga jumlah kelahiran akan bertambah, dan menyebabkan padat penduduk. Mustika (2011) juga mengatakan perlu adanya penyeimbangan dan pemerataan penyebaran penduduk di antar daerah suatu negara. Biasanya daerah yang sangat padat penduduknya berpotensi besar tingkat kemiskinannya.

Sedangkan menurut Nelson dan Leibstein dalam Sukirno (2006) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein dalam Sukirno (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan

tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan secara berarti, kemudian dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

d. Hubungan Pengeluaran Perkapita dengan Jumlah Penduduk Miskin

Pengeluaran perkapita berdasarkan pengertian dari Badan Pusat Statistik adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Data pengeluaran rumah tangga menunjukkan pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pendapatan dalam rumah tangga, maka semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk (Badan Pusat Statistik, 2017).

Teori Ernest Engel dalam Salvatore (2006) menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga maka semakin rendah persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan”. Berdasarkan teori ini

dapat dikatakan keluarga akan lebih sejahtera jika presentase pengeluaran untuk non pangannya lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Dengan kata lain, dalam hal ini semakin besar tingkat pendapatan keluarga, maka akan semakin besar tingkat pengeluarannya untuk non pangan.

Ernest Engel juga mengatakan bahwa bila variabel selera dianggap sama, maka persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran akan semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Begitu pula sebaliknya.

Semakin meningkatnya pengeluaran perkapita dapat memberikan dampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin disuatu daerah, karena semakin tinggi pengeluaran perkapita seseorang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan (Finkanaya & Dewi, 2016). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliyah (2007) dalam Finkanaya dan Dewi (2016) mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh konsumsi perkapita secara negatif dan signifikan. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli seseorang atau masyarakat, dan kesejahteraan seseorang dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan inflasi lebih rendah dari nominal pengeluaran rumah tangga pada periode yang sama.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini penulis akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik mengenai kemiskinan dan menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan penulis dalam menyusun penelitian ini.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1	Sussy Susanti, 2013, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan Analisis Data Panel.	Metode Regresi Data Panel	<ul style="list-style-type: none">• PDRB• Pengangguran• IPM	<ol style="list-style-type: none">1. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan2. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan3. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan
2	I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi, 2013, Beberapa Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none">• Pertumbuhan ekonomi• Upah minimum• Tingkat pendidikan• Tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none">1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan.2. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan3. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan

				4. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan
3	Candra Mustika, 2011, pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PDB • Jumlah Penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDB berpengaruh negatif dan signifikan. 2. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan.
4	Made Kembar Sri Budhi, 2013, Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali : Analisis FEM Data Panel	<i>Fixed Effect</i> Model	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Jumlah penduduk • PDRB • Share sektor pertanian • Share sektor industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 2. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 3. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan 4. Variabel <i>share</i> sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan 5. Variabel <i>share</i> sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan
5	Reggi Irfan Pambudi, Mohammad Saleh, dan Teguh Hadi Priyono, 2016, Analisis Pengaruh	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Upah Minimum Regional (UMR) • Pengangguran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel Upah Minimum Regional

	Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Pengangguran Terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur			berpengaruh negatif dan signifikan 3. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan
6	Sudirman dan Lili Andriani, 2017, Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	Metode regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum • Inflasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan
7	I Putu Arya Finkanaya dan Made Heny Urmila Dewi, 2016, Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2004-2013	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Angka Harapan hidup • Rata-rata Lama Sekolah • Angka Melek Huruf • Pengeluaran perkapita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan 3. Variabel Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan 4. Variabel Angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan 5. Variabel Pengeluaran perkapita berpengaruh

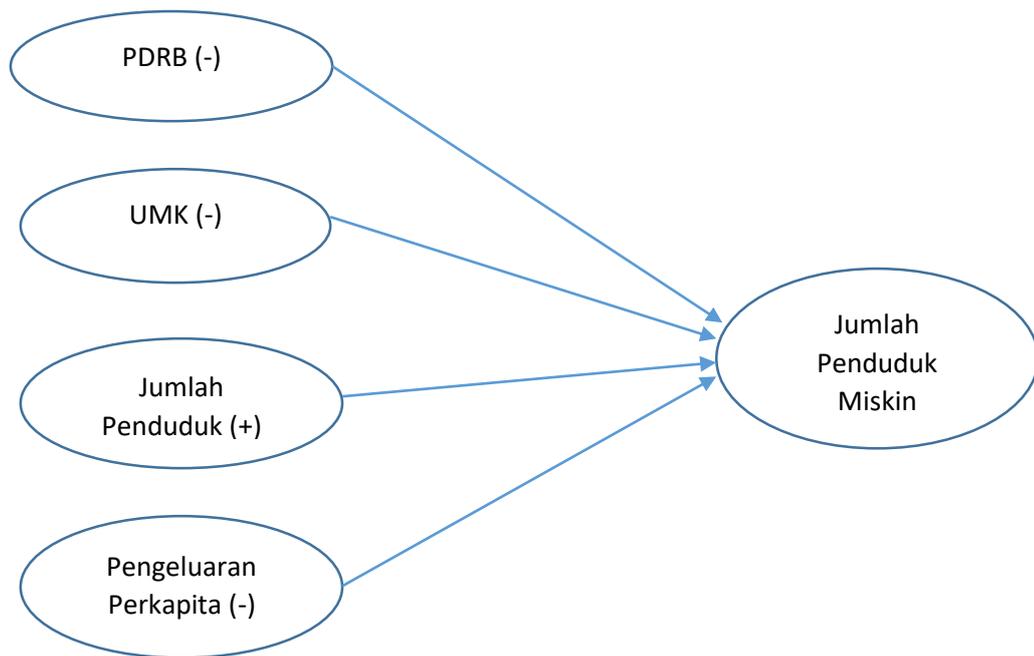
				negatif dan signifikan
8	Novi Astika Sari dan Ketut Suardhika Natha, 2016, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999-2013	Metode Regresi Linear berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan penduduk • Inflasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 3. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan
9	Mona Adriana, 2016, Determinants of Poverty: Panel Data Analysis in Asean-5; 1990-2013	Metode Regresi Data Panel, <i>Fixed Effect Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PDB • Tingkat Inflasi • Tingkat Penduduk • Tingkat Pengangguran • Tingkat buta huruf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDB berpengaruh negatif dan signifikan 2. Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan 3. Tingkat Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 4. Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan 5. Tingkat buta huruf berpengaruh negatif dan signifikan
10.	Ratan Kumar Ghosal, 2012, Growth, Poverty	Pendekatan elastisitas dan estimasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Pendapatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan pendapatan dan Perdagangan

	and Inequality Paradox in India: A Panel Data Approach	Model Data Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Internal 	<p>Internal berpengaruh (pro) terhadap kemiskinan di Vietnam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam jangka panjang Pertumbuhan pendapatan dan Perdagangan memiliki peran positif dalam pengurangan kemiskinan 3. pertumbuhan yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan.
11	Ina Purwantini Rahayu, Tri Widodo, 2012, The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in ASEAN: a General Method of Moments/Dynamic Panel Data Analysis	Metode Panel Data Dinamis (GMM/DP D)	<ul style="list-style-type: none"> • Korupsi • Kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan tidak mempengaruhi korupsi, sementara korupsi menyebabkan kemiskinan 2. Ada kausalitas searah, yakni korupsi ke kemiskinan

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemikiran teoritis dan juga beberapa hasil kajian dari penelitian terdahulu yang penulis lakukan mengenai berbagai hubungan antara variabel independen (PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk,

dan Pengeluaran Perkapita) dengan Variabel dependen (Jumlah Penduduk Miskin), maka faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Berdasarkan paparan diatas, yakni latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

2. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
4. Diduga Pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

